

**MEMBUKA PINTU KEBIJAKAN TERHADAP DESA ADAT YANG
BERKARAKTER DALAM PENGELOLAAN PARIWISATA DI BADUNG**

I Ketut Kasna

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mahendradatta

johnkresna44@gmail.com

Abstrak - Relasi pemerintahan daerah terhadap desa adat sangat besar mengingat Badung yang memiliki potensi seni budaya sebagai identitas yang berkarakter cukup dikenal oleh dunia luar, menyebabkan Badung dikembangkan menjadi daerah tujuan wisata. Namun, pengembangan Badung sebagai daerah tujuan wisata harus dilakukan dengan berbagai macam cara oleh pemerintah daerah sejak awal th 1970. Akan tetapi, Badung saat ini dijadikan pilot proyek tujuan wisata yang berkarakter dari generasi-kegenerasi, karena potensi seni budaya Badung telah banyak di promosikan di luar negeri. Mengembangkan Badung sebagai daerah tujuan wisata, menimbulkan pergulatan identitas budaya antara kebijakan berkarakter terhadap kepentingan pemerintah pusat dengan kepentingan pemerintah daerah Badung dan para stackholder sebagai pelaku wisata. Pemerintah pusat membutuhkan devisa sedangkan pemerintah daerah ingin mempertahankan identitas budaya Badung sebagai budaya yang berkarakter bagian dari kegiatan keagamaan, adat istiadat, ritual serta agama. Namun dengan demikian, tulisan ini bertujuan untuk mengelola, mengembangkan serta mengkaji seni pertunjukan, (seni tari, seni kerawitan) sebagai salah satu warisan desa adat dengan berbasis seni budaya Badung, ditengah-tengah pergulatan identitas itu. Fokus kajian dalam tulisan ini adalah bagaimana mengembangkan seni pertunjukan yang berkarakter, seni tari, seni kerawitan dalam binkai tradisional Badung dalam pergulatan itu? dan, bagaimana pemerintah daerah Badung mempertahankan identitas desa adat dalam seni budaya?. Untuk mengkaji permasalah di atas digunakan metode penelitian kualitatif, dengan teori hegemoni. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa seni pertunjukan tradisional Bali mengalami sekularisasi, dan konsep pariwisata budaya mengalami perubahan menjadi industri wisata yang berkelanjutan serta mensejahterakan masyarakat Badung.

Kata Kunci: *kebijakan, desa adat berkarakter, pariwisata*

Abstract - The relationship between local government and traditional villages is very large, considering that Badung has potential art and culture as an identity whose character is well known to the outside world, causing Badung to developed into a tourist destination. However, the management of Badung as a tourist destination must be carried out in various ways by the local government of Badung. However, currently Badung is made a pilot project for a tourist destination with character from generations, because the potential of Badung's arts and culture has been widely promoted abroad. Management of Badung as a tourist destination, raises the struggle for cultural identity between character policies against the interests of the central government andthe interests of the local government of Badung and the stakeholders as tourism actors. Central government need foreign exchange while the local government wants to maintain the cultural identity of Badung as a culture that is characterized as part of religious activities, customs, rituals and religion. But with Thus, this paper aims to manage, develop and study cultural arts that are character, (dance art, craft art) as one of the traditional village heritages based

on cultural arts character, in the midst of that identity struggle. The focus of the study in this paper is how develop cultural arts with character, such as: the art of dance, the art of crafting in the traditional village framework The custom in the struggle? and, how the local government of Badung maintains the identity of the traditional village in the arts and culture? To examine the problem above the quality research method, with the theory hegemony. The results of this study indicate that traditional cultural arts in the Badung Traditional Village have experienced secularization, and the concept of cultural tourism is changing into a sustainable tourism industr and the goal of the welfare of the Badung people.

Keywords: policy, traditional village with character, tour

PENDAHULUAN

Sebagai sebuah etnis dalam pluralis multikultural, etnisitas serta globalisasi yang hidup diwilayah Nusantara, masyarakat Badung mempunyai kekayaan seni budaya yang khas dan telah menjadikan Badung sebagai masyarakat yang berkarakter mempunyai beragam seni,tradisi dan mitos yang cukup dikenal oleh di mata dunia. Banyak pencitraan-pencitraan yang dilakukan oleh orang asing yang datang ke Badung sejak th 1970, seperti mempromosikan Badung sebagai: *Badung wellcome year tourism*. Dengan pecitraan itu daya tarik wisatawan manca Negara untuk datang ke Badung sangat kuat sehingga Badung berkembang menjadi daerah tujuan wisata yang sangat terkenal tidak hanya di dalam negeri tetapi sampai ke manca negara. Namun, keterkaitan seni budaya Badung secara holistik antara seni, adat istiadat, agama dan upacara telah memberikan gaya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk datang ke Badung. Oleh karena itu maka, Badung ditetapkan secara resmi menjadi daerah kunjungan wisata oleh pemerintah Indonesia berdasarkan Inpres No 9 tahun 1969 (Yoeti, 1985:56). Masyarakat dan pemerintah daerah Badung sangat menyadari bahwa daerah wisata akan menjadi tempat pertemuan berbagai bentuk budaya yang di bawa oleh wisatawan.

Kesadaran masyarakat dan pemerintah daerah Badung telah menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat, intelektual pemerintah bahwa seni budaya Badung akan di dilibas oleh budaya global yang di bawa langsung oleh wisatawan yang datang ke Badung. Masyarakat dan Pemerintah daerah Badung, sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tidak memiliki kekuatan untuk menolak Intruksi Presiden tersebut, tetapi tetap tetap berusaha untuk menyelamatkan seni budaya Badung dari pengaruh-pengaruh negatif budaya luar.

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji gagasan-gagasan intelektual, para stakholder pelaku wisata, seniman, budayawan, pemerintah daerah dan, masyarakat Badung dalam mengantisipasi kekhawatiran akan terjadinya pengaruh negatif pariwisata terhadap seni budaya dan masyarakat. Namun, untuk mengantisipasi kemungkinan tersebut maka, Badung mulai menerapkan kebijakan-kebijakan yang berkarakter dalam gagasan-gagasan untuk menguatkan pengelolaan identitas seni budaya di Badung dari ancaman budaya luar yang di bawa oleh wisatawan. Perlu dijelaskan disini bahwa penguatan dalam pengelolaan identitas seni budaya di Badung, telah dilakukan oleh pemerintah daerah melalui pelatihan-pelatihan disekolah seperti

sekolah pelatihan p4b, SMK Swasta Pariwisata dan stp Nusa dua.

Berkembangnya pariwisata di Badung juga dikhawatirkan akan berdampak negatif terhadap kehidupan seni budaya Badung, namun sangat dibutuhkan juga konsep budaya yang dapat melindungi seni budaya di Badung. Tulisan ini difokuskan pada permasalahan yang terkait dengan keberadaan seni pertunjukan di tengah-tengah perkembangan pariwisata yang menimbulkan pergulatan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Keinginan pemerintah pusat untuk meningkatkan pendapatan negara dan kesejahteraan masyarakat terutama di desa adat dibutuhkan kiat-kiat ekonomi. Satunya kiat ekonomi bagi daerah Badung adalah mengembangkan pariwisata. Pemerintah daerah Badung di bawah kepemimpinan Bupati I Nyoman Giriprasta, S.Sos sangat khawatir bahwa pariwisata akan berdampak pada tergilasnya budaya di Badung dan desa adat yang berkarakter akan kehilangan jati diri atau identitas. Dengan demikian permasalahan dalam tulisan ini akan difokuskan pada, bagaimana mengembangkan seni pertunjukan tradisional di Badung dalam pergulatan itu antara pusat dan daerah? dan, bagaimana pemerintah daerah di Badung mempertahankan seni pertunjukan tradisional sebagai identitas budaya?

Untuk mengantisipasi kemungkinan pariwisata yang dikembangkan merongrong seni budaya di Badung yang memiliki kekhasan sendiri serta sangat diminati oleh pihak asing, maka Pemerintah daerah Badung bekerjasama dengan para intelektual, budayawan dan seniman untuk merumuskan sebuah konsep, sebagai landasan untuk memperkuat seni budaya di Badung agar tidak mudah digilas oleh perkembangan pariwisata yang

dikhawatirkan mengandeng kepentingan-kepentingan kapitalis. konsep seni *wali, bebali* dan *balih-balihan*, serta kebijakan pemerintah daerah di Badung yang mengembangkan konsep *pariwisata budaya* dapat dianggap sebagai landasan ideal untuk melindungi atau membentengi seni budaya di Badung dari pengaruh negatif budaya luar sebagai dampak pariwisata.

RUMUSAN MASALAH

Semua yang telah dipaparkan di atas menunjukkan bahwa telah terjadi suatu perubahan yang cukup mendasar dalam “Membuka pintu kebijakan terhadap desa adat yang berkarakter dalam mengembangkan pariwisata di Badung”. Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas ada sejumlah masalah yang kiranya dapat diangkat dalam penelitian ini. Tiga masalah utama yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah membuka pintu kebijakan untuk mengembangkan seni pertunjukan, seni tari, seni kerawitan dalam binkai tradisional desa adat yang berkarakter di Badung dalam pergaulan itu? dan
- b. Bagaimanakah pemerintah daerah di Badung mempertahankan identitas desa adat yang berkarakter dalam seni budaya?.
- c. Bagaimanakah relasi antara pemerintah daerah dengan desa adat yang berkarakter, pelaku wisata dalam pengelolaan pariwisata di Badung?

Tujuan Penelitian

Penelitian memiliki dua tujuan yang berbeda namun saling terkait. Kedua tujuan yang dimaksud adalah tujuan umum dan tujuan khusus.

Tujuan umum: Secara umum, sebagai bagian dari kegiatan keilmuan dalam usaha pengembangan ilmu,

penelitian ini bertujuan untuk mengkaji serta memproleh pengetahuan tentang analisis kebijakan terhadap desa adat yang berkarakter dalam pengembangan pariwisata Badung yang dimasukkan atau digunakan dalam bingkai identitas budaya yang berkarakter.

Tujuan khusus: Secara khusus, sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini dapat dipilahkan menjadi tiga seperti dibawah ini. Adapun tujuan khusus dalam hal ini adalah:

1. Untuk mengkaji wacana analisis kebijakan pengembangan pariwisata Badung sebagai binkai identitas budaya yang berkarakter di kabupaten Badung.
2. Untuk menemukan identitas, mengapa binkai budaya yang berkarakter dianalisis kebijakan dalam pengembangan pariwisata Badung di kabupaten Badung.
3. Memahami wacana kebijakan pengembangan pariwisata Badung sebagai binkai identitas budaya yang berkarakter.

MANFAAT PENELITIAN

Hasil temuan dari penelitian ini nanti diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis.

MANFAAT TEORITIS

Secara teoritis manfat penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Dapat dijadikan pijakan teoritis dalam memahami konsep dan idiologi keberadaannya tentang analisis kebijakan pengembangan Badung
2. Dapat dijadikan salah satu reperensi dalam memahami wacana, bentuk, fungsi, dan makna dari keberadaan analisis kebijakan pengembangan pariwisata Badung selanjutnya.

MANFAAT PRAKTIS

Secara praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam beberapa hal:

1. Menumbuhkan kesadaran yang baik dan benar terhadap bentuk kebijakan, makna dan nilai sosial budaya yang berkarakter terhadap pengembangan pariwisata di Badung.
2. Dapat digunakan para pengambil kebijakan dalam rangka pengembangan dan pengelolaan pariwisata serta pihak lain yang bergerak dibidang pariwisata.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam mengkaji fenomena seni budaya di Badung adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan sejarah yang berpegang pada analisis heuristik. Prosedur penelitian kualitatif mulai dari mengumpulkan data, analisis data, kemudian menghubungkan data yang satu dengan yang lainnya menjadi sebuah tulisan ilmiah(Moleong, 2011). Pendekatan sejarah dalam hal ini adalah menguji sumber data, baik sumber tertulis maupun sumber informasi dengan metode kritis sumber (Gottschalk, 1986:35). Pendekatan kualitatif adalah sebuah deskripsi data yang sangat luas dengan landasan yang kokoh, memuat penjelasan-penjelasan tentang proses yang terjadi dalam lingkup penelitian pada suatu objek penelitian.

Objek penelitian dalam hal ini adalah seni pengelolaan tradisional Bali yang telah dipahami mengandung nilai spiritual unik (sacral), dan penuh dengan nilai pengabdian dan kebersamaan sebagai salah bentuk ikatan solidaritas. Krangka pemikiran yang digunakan dalam tulisan ini adalah krangka berpikir sejarah, bahwa Bali dengan desa adatnya

dikembangkan sebagai daerahwisata telah dilakukan oleh pemerintah daerah. Salah satu metode penelitian kualitatif telah menetapkan cara untuk mengumpulkan data adalah melalui observasi. Hasil observasi terhadap seni pertunjukan telah menemukan bahwa, tari sanghyang sebagai salah satu seni sacral telah dikemas menjadi tari kecak, tari barong, tari sngyang jaran yang khusus disajikan untuk wisatawan.

Sebagai alat analisis untuk mengkaji permasalah seni budaya di Badung di tengah-tengah maraknya perkembangan pariwisata digunakan teori hegemoni, konsep sekularisasi, dan konsep pariwisata budaya. Teori hegemoni, merupakan sebuah teori yang menekankan adanya intervensi kekuasaan melalui cara-cara berbudaya untuk memaksakan kepentingan-kepentingan pengusa. Konsep sekularisasi adalah, berkembangnya seni pertunjukan tradisional menjadi seni budaya, dan konsep pariwisata budaya adalah pengembangan pariwisata bali berbasis desa adat budaya yang berkarakter. Kondisi riil yang ada di Badung, telah terjadi pergulatan antara kepentingan kekuasaan dengan konsep pariwisata budaya yang mengarah pada pariwisata industri yang mana untuk tujuannya mensejahterakan masyarakat Badung yang berkelanjutan.

PEMBAHASAN

Keperihatinan terhadap identitas Badung telah banyak diungkap dalam beberapa tulisan seperti oleh Jean Coteau dan Usadi Wiryatnaya dalam bukunya, *Badung di Persimpangan Jalan Sebuah Bunga Rampai*. *Badung setengah hati dalam mengembangkan pariwisata* Badung: Nusa Data Indo Budaya, 1995; Henk Schulte Nordholt, dalam bukunya, *Bali Benteng Terbuka 1995-2005*

Otonomi Daerah, Demokrasi Elektoral dan identitas-Idenitas Defensif. Denpasar: Pustaka Larasan, 2007. Keperihatinnya itu memberikan gambaran bahwa di Badung dengan identitasnya yang khas, seperti seni budaya, agama, adat istiadat yang berkarakter dan tradisi telah tercabik cabik oleh sistem kebijakan pemerintahan dengan desentralisasi dengan otonomi daerah telah berdampak pada dinamika konflik ditingkat lokal. Na mung perkembangan pariwisata juga telah memberikan gambaran bahwa identitas di Badung yang dikuatkan dengan seni budaya telah kehilangan oroginalitas, autentisitas dan unisitas (keutuhan) sebagai dampak dari pengembangan pariwisata yang berorientasi pada kepentingan-kepentingan kapitalis.

Akan sangat penting untuk mengkaji kepentingan pusat yang terdapat dibalik peristiwa berkembangnya *desa adat dengan seni budayanya yang berkarakter*. Bagaimanapun pemerintah daerah tetap ingin menguatkan kekuasaannya serta mengeksplorasi desa adat di Badung untuk mendapatkan keuntungan bagi pemerintah daerah. Pariwisata yang dikembangkan di Badung berdasarkan Instruksi Presiden No 9 tahun 1969 mengisyaratkan adanya sistem jual beli yang berorientasi uang. Artinya pariwisata yang mengarah pada pengelolaan industri budaya. Hal ini menimbulkan keprihatinan bagi intelektual, seniman dan budawayan mengenai dampak bagi seni budaya di Badung yang telah dikenal merupakan identitas Badung sebagai seni dan tradisi budaya yang berkelanjutan.

Berkembangnya industry budaya sebagai konsumsi wisata telah mendorong

pariwisata di Badung masuk ke dalam sistem kapitalis. Sistem kapitalis dalam hal ini adalah sistem ekonomi yang memiliki aspek ganda artinya, disatu pihak memiliki *nilai guna* (use value), dan di lain pihak memiliki *nilai tukar* (exchange value) (Giddens, 2009 : 57). Fenomena kesenian di Badung telah berkembang menjadi industri budaya yang memiliki nilai guna dan juga diperjual belikan kepada wisatawan untuk memenuhi kebutuhan hidup desa adat di Badung. Akan sangat dapat dipahami bahwa pariwisata Badung adalah bagian dari mata pencaharian orang Badung dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian maka kesenian di Badung masuk kedalam arena *produksi cultural*. Arena produksi cultural dibedakan menjadi dua sub arena, yaitu arena produksi terbatas dan arena produksi sekala besar (Bourdeau, 2010: xxxiii).

Seni budaya yang berkarakter di Badung merupakan identitas yang menyebabkan Badung cukup di dikenal oleh dunia luar, karena itu pemerintah dan masyarakat di Badung berkepentingan melestarikan seni budaya di Badung supaya tetap utuh dan tidak dicemari oleh pengaruh budaya luar. Identitas akan merujuk pada gambaran atau citra suatu Bangsa (Tilaar, 2007:35). Identitas orang di Badung yang telah terbentuk sebagai sebuah citra yang dipahami oleh orang luar terhadap Badung, disamping keramahan tamahannya adalah seni budaya. Sangat dapat disadari bahwa mengembangkan pariwisata Badung akan menyebabkan Badung menjadi ruang pergulatan berbagai macam jenis dan bentuk budaya. Salah satu cara untuk mempertahankan seni budaya Bali bagi

pemerintah daerah adalah kebijakan mendirikan sekolah pelatihan stp dan p4b SMK Swasta Pariwisata dengan memasukan seni budaya Badung dalam kurikulum pendidikan yang dikenal dengan manajemen pariwisata Konsep seni budaya dalam dunia pendidikan yang digagas oleh pemerintah daerah bisa dipahami sebagai usaha untuk memperkuat identitas seni budaya Badung. Oleh karena Badung sering merupakan gagasan pemerintah daerah dapat dianggap memiliki motivasi politik tersembunyi untuk membendung meluasnya faham nasionalisme di Badung.

Nampaknya di Balik berdirinya seni budaya ada hegemoni daerah yang ingin tetap mengusai Badung agar tidak bersatu atau menjadi bagian dari kabupaten lain bahkan Badung harus tetap menjadi wilayah yang Keinginan ini sangat jelas, dapat dipahami bahwa pemerintah Hegemoni pemerintah daerah dalam hal ini merupakan konsep partikular yang digunakan untuk mempertahankan tatanan sosial atau polidaerah tertentu dengan mengadakan relasi antara budaya desa adat dengan pemerintah daerah yang dianggap budaya elite dengan budaya masyarakat Badung yang dianggap sebagai budaya massa atau budaya populer.

Budaya Badung kemudian dijadikan budaya populer sejak tahun 1970, yang secara sederhana budaya massa adalah budaya populer yang dihasilkan melalui teknik-teknik industri produksi massal dan dipasarkan untuk mendapatkan kuntungan kepada khalayak konsumen massa (Strinati, 2010:36). Hal ini telah

dilakukan sejak tahun 1970 dengan dikemasnya koor laki-laki pada tari Sang Hyang, tradisi mekotekan, tradisi tipat bantal, tradisi ngerobok menjadi seni pertunjukan Kecak oleh Walter Spies dan Baryl de Zoete bersama dengan seke kesenian di Badung, Bali (Bandem, 1983: 42). Kecak di Pura Uluwatu Ungasan Kuta Selatan kemudian menjadi seni komersial yang dapat mendatangkan uang, dengan demikian maka Kecak diproduksi secara Massal dan memiliki standar tersendiri.

Hegemoni pada dasarnya adalah upaya untuk menggiring agar orang menilai dan menerima fenomena sosial dalam krangka yang ditentukan oleh penguasa dengan cara mempengaruhi struktur kognitif masyarakat (ideasional). Upaya itu dilakukan melalui ideologi tertentu yang dianggap benar secara moral oleh masyarakat, sehingga dominasi ide pemegang kuasa tidak dipertanyakan lagi (Burke, 2011:128; Hasan, 2011: 26). Relasi antara budaya pengusa, pemerintah daerah dengan gagasan-gagasan intelektual pada masa pemerintah daerah dilakukan dengan mendirikan seni budaya serta mendirikan sanggar seni (yang sekarang disebut dengan Gedung jaya sabha Badung). Kondisi ini dapat dianggap sebagai relasi antara budaya dominasi dengan budaya subordinat dan relasi ini akan dapat dipahami sebagai sebuah kontrol sosial atau hegemoni budaya (Burke, 2011: 126). Keberhasilan pemegang kuasa menyebarluaskan pengaruh hegemoninya karena didukung oleh organisasi

infrastruktur terkait yang di dalamnya terjadi kepatuhan para intelektual karena faktor kultural dan politis (Kumbara, 2010: 10).

Konsep hegemoni budaya yang ditawarkan oleh Gramsci dalam hal ini adalah penguasa memerintah tidak dengan kekerasan semata-mata tetapi dengan persuasi dan dalam persuasi ini ada persekongkolan dengan beberapa orang yang dianggap berpengaruh dalam melindungi danmelestarikan seni budaya di Badung supaya tetap utuh dan tidak dicemari oleh pengaruh budaya luar. Identitas akan merujuk pada gambaran atau citra suatu Bangsa (Tilaar, 2007:35). Identitas orang di Badung yang telah terbentuk sebagai sebuah citra yang dipahami oleh orang luar terhadap Badung, disamping keramah tamahannya adalah seni budaya. Sangat dapat disadari bahwa mengembangkan pariwisata Badung akan menyebabkan Badung menjadi ruang pergulatan berbagai macam jenis dan bentuk budaya. Salah satu cara untuk mempertahankan seni budaya Bali bagi pemerintah daerah adalah kebijakan mendirikan sekolah pelatihan stp dan p4b SMK Swasta Pariwisata dengan memasukan seni budaya Badung dalam kurikulum pendidikan yang dikenal dengan *manajemen pariwisata*. Konsep seni budaya dalam dunia pendidikan yang digagas oleh pemerintah daerah bisa dipahami sebagai uasaha untuk memperkuat identitas seni budaya Badung. Oleh karena Badung sering merupakan gagasan pemnerintah daerah dapat dianggap memiliki motivasi politik tersembunyi untuk membendung meluasnya *faham nasionalisme* di Badung.

Nampaknya di Balik berdirinya

seni budaya ada *hegemoni daerah* yang ingin tetap mengusai Badung agar tidak bersatu atau menjadi bagian dari kabupaten lain bahkan Badung harus tetap menjadi wilayah yang Keinginan ini sangat jelas, dapat dipahami bahwa pemerintah Hegemoni pemerintah daerah dalam hal ini merupakan konsep partikular yang digunakan untuk mempertahankan tatanan sosial atau polidaerah tertentu dengan mengadakan relasi antara budaya desa adat dengan pemerintah daerah yang dianggap budaya elite dengan budaya masyarakat Badung yang dianggap sebagai budaya massa atau budaya populer.

Budaya Badung kemudian dijadikan budaya populer sejak tahun 1970, yang secara sederhana budaya massa adalah budaya populer yang dihasilkan melalui teknik-teknik industri produksi massal dan dipasarkan untuk mendapatkan keuntungan kepada khalayak konsumen massa (Strinati, 2010:36). Hal ini telah dilakukan sejak tahun 1970 dengan dikemasnya *koor laki-laki* pada tari Sang Hyang, tradisi mekotekan, tradisi tipat bantal, tradisi ngerobok menjadi seni pertunjukan Kecak oleh Walter Spies dan Baryl de Zoete bersama dengan sekejuluk kesenian di Badung, Bali (Bandem, 1983: 42). Kecak di Pura Uluwatu Ungasan Kuta Selatan kemudian menjadi seni komersial yang dapat mendatangkan uang, dengan demikian maka Kecak diproduksi secara Massal dan memiliki standar tersendiri.

Hegemoni pada dasarnya adalah upaya untuk menggiring agar orang menilai dan menerima fenomena sosial dalam krangka yang ditentukan oleh penguasa dengan cara mempengaruhi *struktur kognitif* masyarakat (*ideasional*). Upaya itu dilakukan melalui ideologi tertentu yang dianggap benar secara moral oleh masyarakat, sehingga dominasi ide pemegang kuasa tidak dipertanyakan lagi (Burke, 2011:128; Hasan, 2011: 26).

Relasi antara budaya pengusa, pemerintah daerah dengan gagasan-gagasan intelektual pada masa pemerintah daerah dilakukan dengan mendirikan *seni budaya* serta mendirikan sanggar seni (yang sekarang disebut dengan Gedung jaya sabha Badung). Kondisi ini dapat dianggap sebagai relasi antara budaya dominasi dengan budaya subordinat dan relasi ini akan dapat dipahami sebagai sebuah *kontrol sosial* atau *hegemoni budaya* (Burke, 2011: 126). Keberhasilan pemegang kuasa menyebarkan pengaruh hegemoninya karena didukung oleh organisasi infrastruktur terkait yang di dalamnya terjadi kepatuhan para intelektual karena faktor kultural dan politis (Kumbara, 2010: 10).

Konsep hegemoni budaya yang ditawarkan oleh Gramsci dalam hal ini adalah penguasa memerintah tidak dengan kekerasan semata-mata tetapi dengan *persuasi* dan dalam *persuasi* ini ada persekongkolan dengan beberapa orang yang dianggap berpengaruh dalam bidang *seni budaya Badung* yang di dalamnya termasuk juga agamawan dan seniman. Untuk menganalisis adanya perskongkolan ini Pierre Bourdeau menawarkan konsep kekerasan *simbolis* dan *negosiasi*. Konsep itu merujuk pada proses yang memaksa kelompok yang diakuasai agar mengakui kesahian budaya kelas penguasa (Burke, 2011:129). Budaya kelas penguasa pada waktu itu adalah budaya kapitalis dan komersialisasi untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dalam bentuk uang. Budaya kapitalis adalah identitas budaya penjajah yang ingin mendapatkan keuntungan ekonomi dari tanah jajahannya. Salah satu sistem yang harus dikembangkan di Badung adalah menjadikan Badung sebagai daerah tujuan wisata. Ideologi pemerintah daerah dalam hal ini adalah berkaitan dengan penyebaran gagasan dan penciptaan gagasan yang

merupakan bangunan super sosial yang memberikan pemberian terhadap kepentingan kelas dominan (Giddens, 2007:52). Menurut pendapat saya, berdasarkan ideologi itulah pemerintah daerah mendorong pengembangan pariwisata pada awal tahun 1970.

Ketertarikan pemerintah daerah pada seni budaya Badung, menyebabkan Badung di promosikan sebagai daerah wisata yang cukup bagus yang dilakukan oleh *Vereniging Toristen Verkeer* (VTV) sejak tahun 1970. Promosi dilakukan dengan cara menerbitan guide book mengenai objek wisata yang ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Lombok, Sumatra Utara, Simatra Barat, Banten, Toraja yang semuanya dicetak dengan menggunakan bahasa Inggris (Yoeti, 1985:31). Berdasarkan promosi itu maka *travel agent* di Badung yang bernama BMW mulai bergerak untuk membawa wisatawan ke Badung dengan menggunakan Sejak tahun 1970,-anbanyak berdatangan wisatawan, peneliti dan seniman ke Badung. Untuk menampung wisatawan yang datang maka mulai dibangun beberapa Hotel di antara Hotel Ramada Bintang Bali Resort dan Kartika Plaza Beach, kemudian Santika Bali Hotel.

Sejak Indonesia Merdeka kepariwisataan juga di kembangkan dengan mendirikan Bali Beach Hotel di Sanur yang merupakan satu-satunya Hotel bangsa Indonesia yang bergerak dalam bidang kepariwisataan. Kemudian tahun 1953 didirikan SERGAHTI(*Serikat Gabungan Hotel dan Tourisme Indonesia*) dan tahun 1955 didirikan PT. NATOUR (*Hotel and Tourism Corp*). Kepariwisatan pada saat ini tidak berkembang dengan baik karena iklim politik dalam negeri kurang stabil karena munculnya berbagai gerakan sparatis, landasan negara belum kuat bentuk negara masih diperdebatkan, dan sistem pemerintahan belum stabil.

Kepariwisataan mendapatkan angin segar sejak keluarnya Instruksi Presiden No. 9 tahun 1969 yang pada pasal 2 Instruksi tersebut ngeisyaratkan bahwa tujuan pengembangan pariwisata adalah untuk meningkatkan devisa negara.

Dalam Instruksi ini telah tersirat kepentingan negara untuk mendapatkan devisa yang artinya potensi kepariwisataan diarahkan untuk mendapatkan uang, sehingga berbagai produk budaya termasuk kesenian juga diarahkan agar dapat diperjual belikan untuk devisa negara dengan alasan kesejahteraan masyarakat. Kondisi ini kembali menggoncang pemikiran masyarakat terutama masyarakat Badung yang memiliki potensi seni budaya yang bernilai sacral. Muncul pemikiran bahwa pariwisata tidak akan bisa dielakan lagi karena pengembangan pariwisata merupakan kepentingan kekuasaan pusat, tetapi bagaimana memagari seni budaya Badung yang bernilai sakral agar tidak digilas oleh pariwisata yang mempunyai kepentingan ekonomi dibalik keinginan untuk menguatkan dan membuka pintu kebijakan identitas desa adat dan citra Badung di mata dunia melalui seni budaya. Untuk tujuan ini maka di butuhkan peranan intelektual organik untuk memberikan gagasan-gagasan atau ide-ide yang dapat digunakan untuk memperkuat atau menjaga kepentingan Badung. Dalam hal ini intelektual dikaitkan dengan suatu struktur dan fungsi sosial tertentu. Menurut Seymour Martin Lipset, intelektual adalah mereka yang menciptakan, menyebarluaskan dan menjalankan kebudayaan (Mutahir, 2011: 3).

Dalam hal ini masyarakat Badung melihat peran dan posisi intelektual dalam rangka melestarikan, melindungi dan

mempertahankan nilai-nilai budaya yang dianggap memiliki kebijakan serta tatanan sosial yang bisa menyebabkan Badung menjadi lebih baik. Tidak tertutup kemungkinan bahwa perubahan akan terjadi karena kebudayaan sebuah konstruksi, tetapi perubahan yang diharapkan oleh masyarakat tidak membawa nilai-nilai budaya Badung keambang kehancuran akibat desakan budaya luar. Untuk kepentingan penciptaan gagasan, penyebar luasan gagasan maka kerapkali intelektual dijadikan rujukan serta menjalankan roda kebudayan khususnya kebudayaan di Badung yang memiliki kekhasan sendiri, maka intelektual sering kali dijadikan rujukan (Eyerman, 1996: 1-2). Dalam masyarakat di Badung intelektual dianggap sebagai orang yang mempunyai kemampuan lebih luas, sehingga intelektual dijadikan tumpuan harapan dalam memperjuangkan kehidupan mereka, baik mengenai masalah sosial, maupun masalah seni budaya. Intelektual dianggap mampu menegosiasi kekuasaan, karena intelektual merupakan kelompok yang diperhitungkan oleh penguasa sebagai pemikir kritis dalam memikirkan Badung.

Dengan mencermati pandangan Gramsci tentang intelektual maka tidak semua intelektual mempunyai fungsi intelektual dalam masyarakat, karena itu Gramsci membedakan tipe intelektual yaitu : 1) Intelektual Tradisional adalah intelektual yang menyebarkan ide dan menjadi mediator antara rakyat dengan kelas atasannya, 2) Intelektual Organik adalah intelektual yang dengan penelitian dan studinya berusaha memberikan refleksi atas keadaan namun terbatas pada kepentingan kelompoknya sendiri, 3)

Intelektual kritis adalah intelektual yang mampu melepaskan diri dari hegemoni penguasa atau elit kuasa yang sedang memerintah,⁴⁾ Intelektual Universal adalah intelektual akademis yang berusaha untuk memperjuangkan proses peradaban dan struktur budaya yang memperjuangkan kemanusian dan humanisme (Mutahir, 2011 : 5-6).

Sebagai wahana penuangan gagasan dari hasil penelitian dan studinya maka intelektual organik berusaha memberikan refleksi atas keadaan seni budaya Badung yang akan dihadapkan dengan pariwisata. Sebagai refleksi pemikiran intelektual organic yang bekerja sama dengan pemerintah daerah Badung, maka pada tahun 1992 diadakan seminar *seni sacral dan provan*, untuk mengklasifikasi seni yang mana dianggap sacral dan yang mana dapat dianggap provan. Hasil seminar inilah yang kemudian dijadikan benteng untuk memagari seni budaya Badung, dengan klasifikasi seni yang disebut dengan seni *Wali, Bebali dan Balih- Balihan*. Pada tahun 1998 klasifikasi seni itu diperkuat dengan kebijakan pemerintah daerah Badung di bawah Bupati Cok Ratmadi dengan konsep pariwisata budaya.

Kebijakan itu dikeluarkan dengan tujuan agar seni budaya Badung tetap bisa dilindungi walupun tidak mungkin menghindar dari perkembangan pariwisata, karena kebijakan untuk mengembangkan pariwisata Bali merupakan kebijakan pemerintah pusat. Sasaran kebijakan pusat ini adalah mengembangkan pariwisata untuk mendapat devisa negara besar, sehingga sistem ekonomi akan menjadi acuan utama dalam proses pengembangan pariwisata. Setiap berbicara ekonomi maka

asumsi yang melatar belakangi pemikiran kita adalah terjadi proses jual beli dan terbukanya pasar bagi kebutuhan wisatawan. Inpres No 9 tahun 1969 mengindikasikan adanya perubahan sistem pengembangkan pariwisata dari yang berbasis *budaya* menjadi berbasis *industri*, sehingga yang berkembang adalah *industri pariwisata*. Dalam pengamatan saya saat ini apa yang didengung-dengungkan sebagai *pariwisata budaya*, dalam kenyataannya terjadi *industri budaya*.

Peranan aktor dalam struktur pariwisata di Badung menjadi sangat penting untuk diperhatikan, untuk itu Anthony Giddens menawarkan konsep yang disebut dengan *Strukturasi* (Burke, 2011: 168). Teori Strukturasi Giddens, memusatkan perhatianya pada praktik sosial yang berulang yang pada dasarnya adalah sebuah teori yang menghubungkan antara agen atau akor dengan struktur. Untuk menjelaskan hubungan dalektika dan saling pengaruh mempengaruhi antara agen dengan struktur dapat dilihat melalui tindakan manusia. Seluruh tindakan sosial memerlukan struktur dan seluruh struktur memerlukan tindakan sosial. Agen dan struktur saling jalin menjalin tanpa terpisahkan dalam praktik atau aktivitas manusia (Ritzer, Douglas J Godman, 2004: 507-508).

Klasifikasi seni sacral dan provan yang tertuang dalam konsep Wali, Bebali dan Balih-Balihan dimainkan oleh tindakan *aktor aktor pariwisata*, sehingga *seni wali dan balih-balihan* menjadi konsep yang sangat kabur. Hal ini menunjukkan bahwa seni pertunjukan sebagai arena produksi cultural mengalami pergulatan identitas antara *arena produksi terbatas* yang sering dianggap sebagai seni tinggi, serius, ritual, atau seni klasik yang bersifat simbolis, prestise, dan slebritis artistik, pada

prinsipnya menolak determinisme ekonomi dan politik dengan *arena produksi sekala besar* yang berorientasi pasar dan produksi missal (Boerdeau, 2010: xxxiii).

Menurut Bourdeau, arena produksi terbatas adalah produksi seni untuk produsen, dan motif untuk memproleh laba ekonomi disangkal minimal oleh senimannya sendiri. Hierarki otoritas didasarkan atas beraneka bentuk laba simbolis, misalnya ketika orang melihat dirinya sebagai sosok yang tak mengincar laba (Boerdeau, 2010: xxxiv). Kondisi ini sejak munculnya pariwisata telah bergerak menjadi arena produksi budaya sekala besar, yaitu arena produksi yang mencakup budaya massa atau budaya poluler yang diproduksi secara massal dan dipertahankan oleh industry budaya yang bersekala besar dan kompleks, prinsip hierarkisnya yang dominan melibatkan modal ekonomi atau *the bottom line* (laba financial) (Bouedeau, 2010: xxxv). Identitas seni budaya Badung, tidak lagi bersifat esensial seperti yang diwarisi, tetapi pariwisata telah menjadi acuan identitas Badung, dengan kata lain bahwa identitas Badung adalah pariwisata. Hal ini menunjukkan bahwa di era reformasi esensialisme identitas kembali terbuka lebar untuk dipersoalkan, ditafsirkan kembali, ditangkap dan dimanfaatkan dalam proses sosial dan negosiasi politik dan juga dikembalikan pada ruang cultural tradisi (Ramstedt, Thufail, ed, 2011: 3).

Dengan demikian maka dalam memahami perkembangan pariwisata di Badung akan nampak adanya hegemoni kekuasaan pusat terhadap daerah dalam rangka mengembangkan pariwisata di Badung untuk dapat mendatangkan devisa negara. Hegemoni dalam hal ini adalah sebuah situasi dimana blok historis faksi kelas yang berkuasa menjalankan otoritas sosial dan kepemimpinan atas kelas subordinat melalui kombinasi antara

kekuatan, dan terlebih lagi dengan konsensus (Barker, 2004: 62). Faksi kekuasaan pusat dalam hal ini dijalankan melalui kombinasi antara kekuasaan pusat dengan consensus pada pemerintahan daerah yang artinya hegemoni dilakukan melalui Instruksi Presiden No. 9 tahun 1969, yang hanya melihat perkembangan pariwisata Badung dari sudut kepentingan pusat untuk mendapatkan devisa negara.

Memang pemerintah memiliki hak untuk mengintervensi dan untuk mendukung berbagai kegiatan artistik dan kebudayaan milik publik yang tidak memiliki ketertarikan pasar, tetapi juga harus melindungi apa-apa yang mulai muncul yang tidak mendapatkan sambutan khalayak luas dengan segera (Smiers, 2009: 307). Apabila dikaitkan dengan seni budaya Badung dan pariwisata maka disamping mendorong seni budaya untuk pasar wisata, tetapi juga harus melindungi seni budaya yang dapat menguatkan identitas dan kekhasan seni budaya Badung artinya posisi seni sacral dan propvan menjadi jelas, atau originalitas budaya dan keutuhan budaya Badung harus tetap dilindungi.

KESIMPULAN

Badung dikembangkan sebagai daerah wisata, sudah terjadi sejak pemerintah daerah yang dilanjutkan oleh pemerintah Orde baru dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Salah satu yang dapat dijadikan asset untuk mendapatkan keuntungan ekonomi adalah seni budaya khususnya seni pertunjukan tradisional Badung dan perkembangan industri pariwisata dengan sarana prasarana akomodasinya.

Perkembangan pariwisata dengan harapan mendapatkan keuntungan ekonomi dari seni budaya Badung yang telah ditempatkan sebagai identitas, menimbulkan pergulatan antara kepentingan pusat dengan kepentingan daerah yang

ingin mempertahankan seni budaya Badung sebagai identitas. Melalui seni pertunjukan tradisional dilakukan klasifikasi dan konsep pariwisata yang dikembangkan adalah pariwisata budaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Ide Anak Agung Gde, *Bali Pada Abad XIX Perjuangan Rakyat Dan Raja-Raja Menentang Kolonialisme Belanda, 1808-1908*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1989.
- A.A Ngurah Anom Kumbara, Prof Dr. : Paradigma Kajian Budaya
- Bourdeau, Pierre, *Arena Produksi Kultural Sebuah Kajian Sosiologi Budaya*. Bantul: Kreasi Wacana, 2010.
- Bandem, I Made, *Ensklopedi Tari Bali*. Denpasar : Akademi Seni Tari Indonesia, 1983. Barker, Chris, *Cultural Studies, Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2004. Burke, Peter, *Sejarah dan Teori Sosial*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011. Couteau, Jean dan Usadi Wiryatnaya, *Bali di Persimpangan Jalan Sebuah Bunga Rampai*. Denpasar: Nusa Data Indo Budaya, 1995.
- Eyerman, Ron, Cendekiawan: *Antara Budaya dan Politik Dalam Masyarakat Modern* (penterjemah Matheos Nalle). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1996.
- Fliehaar, H. te, *De Aanpassing van Het Inlandch Onderwijs op Bali aan de Eigen Sfeer*. (Overdruk Uit Koloniale Studies No 2), 1941.
- Giddens, Anthony, *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern, Suatu Analisis Karya Marx, Durkheim dan Max*

- Weber. Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press), 2007.
- Gottschalk, Louis, *Megerti Sejarah*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- Hasil-Hasil Seminar, Seni *Sakral dan Provan Bidang Tari, Tanggal 24-25 Maret 1971*. Denpasar: Proyek Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan Bali, 1971.
- Hasan, Sandi Swardi, *Pengantar Cultural Studies, Sejarah, Pendekatan Konseptual dan Isu Menuju Studi Budaya Kapitalisme Lanjut*. Jakarta: Ar Ruzz Media, 2011.
- Kumbara, A A Ngurah Anom, *Orasi Ilmiah “Konstruksi Wacana Ajeg Bali Dalam Relasi Kuasa: Antara Ideologi dan Utopia*. Denpasar: Universitas Udayana Bukit Jimbaran, 2010.
- Mutahir, Arizal, *Intelektual Kolektif Pierre Bourdeau Sebuah Gerakan Melawan Dominasi*. Bantul: Kreasi Wacana, 2011
- Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.
- Nordhoff, Henk Schulte, *Bali Benteng Terbuka 1995-2005 Otonomi Daerah, Demokrasi Elektoral, dan Identitas-Identitas Defensif*. Denpasar: Pustaka Larasan, 2010.
- Ramstedt, Martin dan Fadjar Ibnu Thufail (ed), *Kegalauan Identitas, Agama, Etnisitas, dan Kewarganegaraan Pasca Orde Baru*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2011.
- Ritzer, George-Doglas J Godman, *Teori Sosiologi Modern Edisi ke Enam*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Santoso, Listyono, dkk, *Seri Pemikiran Tokoh Epistemologi Kiri*. Jakarta: Ar Ruzz Media, 2010.
- Smiers, Joost, Arts *Under Pressure, Memperjuangkan Keaneka Ragaman Budaya di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Insist Press, 2009.
- Strinati, Diminic, *Populer Culture, Pengantar Menuju Teori Budaya Populer*. Yogyakarta : Ar Ruzz Media, 2010.
- Tilaar, H.A.R, *Mengindonesia Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia, Tinjauan dan Perspektif Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Yoeti, Oka A, *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung: Angkasa, 1985.